

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peran pemerintah dalam perekonomian yaitu peran stabilisasi, utamanya adalah stabilisasi harga pangan. Telah banyak kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah tentang stabilisasi harga pangan termasuk perberasaan nasional, mulai dari kebijakan harga dasar yang membawa bangsa Indonesia pada revolusi hijau yang mendorong peningkatan produksi pangan utama tahun 1960-an dan berbagai kebijakan lainnya (Projogo, 2011). Salah satu intervensi yang dilakukan pemerintah untuk mengupayakan stabilisasi harga pangan adalah dengan mengeluarkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang dimulai pada Tahun 2005 dan hingga saat ini kebijakan tersebut masih dilaksanakan.

Kebijakan HPP bertujuan untuk melindungi produsen beras (petani) dari kejatuhan harga terutama pada saat panen raya. Selain itu kebijakan HPP juga bertujuan untuk menstabilkan harga beras. Stabilitas harga beras adalah pemeliharaan tingkat harga beras dari waktu ke waktu untuk menghindari peningkatan harga beras.

Seperti yang dituangkan dalam Inpres No.3 Tahun 2012 dalam rangka menjaga stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilitas harga beras, pengamanan cadangan beras pemerintah dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui HPP Kebijakan tersebut tidak hanya menarik untuk diteliti melainkan juga penting, karena hal tersebut menyangkut pangan pokok masyarakat Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Tahun 2009-2013.

Tahun	HPP Beras (Rupiah)
2009	4.600
2010	5.060
2011	5.060
2012	6.600
2013	6.600

Sumber : (Bulog),2013

Tabel 1. menunjukkan perkembangan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Tahun 2009-2013. Pada Tahun 2009 melalui Inpres No.8 Tahun 2008, pemerintah menentukan HPP sebesar 4.600 rupiah per kilogram. Kemudian pada Tahun 2010 melalui Inpres No. 7 Tahun 2009, pemerintah menentukan HPP sebesar 5.060 rupiah per kilogram. Harga tersebut bertahan hingga Tahun 2011. Kemudian pada Tahun 2012 melalui Inpres No.3 Tahun 2012, pemerintah menentukan HPP sebesar 6.600 per kilogram. Harga tersebut tidak mengalami perubahan hingga tahun 2013. Karena HPP di tetapkan sesuai dengan Inpres, maka tidak setiap tahun kebijakan tersebut mengalami perubahan. Selain itu kebijakan tersebut berlaku secara nasional.

Kusumaningrum (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan kenaikan harga dasar pembelian pemerintah akan meningkatkan harga gabah tingkat petani dan akan meningkatkan pendapatan usaha tani padi per hektar. Namun, juga akan berdampak pada peningkatan harga beras eceran sehingga permintaan beras untuk konsumsi akan berkurang.

Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut (Sukirno,2006).

Pangan di Indonesia sering diidentikkan dengan suatu jenis hasil tanaman yaitu padi, karena pangan jenis ini merupakan makanan yang dijadikan bahan makanan pokok utama. Beras dijadikan hampir seluruh penduduk Indonesia sebagai pemenuhan kebutuhan kalori harian. Seperti yang dituangkan dalam UU No.18 tahun (2012), pangan pokok adalah yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

Beras adalah komoditi pangan yang dihasilkan dari tanaman padi. Beras mempunyai peran yang strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan/stabilitas politik nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia masih tetap menghendaki adanya pasokan /penyediaan dan harga beras yang stabil, serta sepanjang waktu, terdistribusi secara merata dan dengan harga yang terjangkau. Kondisi itu menunjukkan bahwa beras masih

menjadi komoditas strategis secara politis (Suryana, 2001 dalam Kusumaningrum). Begitu pentingnya peranan beras bagi bangsa Indonesia menuntut pemerintah untuk mengupayakan stabilitas harga beras.

Menurut direktur utama Bulog Sutarto Alimoeso dalam laman KOMPAS.com mengemukakan sepuluh provinsi penghasil beras tertinggi di Indonesia pada Tahun 2013 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTB, DKI Jakarta dan Banten, Lampung, Sumatra Selatan, DIY Yogyakarta, dan Aceh. Kontribusi sektor terbesar dalam PDRB Lampung pada tahun 2009-2013 adalah sektor pertanian. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2009 sebesar 41,55%, kemudian pada Tahun 2010 sebesar 38,68 %. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2013 sebesar 36,71%, 36,63% , 36,50 %.

Tabel 2. Perkembangan Produksi Beras Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung pada Tahun 2009-2013 (Ton)

No	Kab/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	L. Barat	79.754	170.457	165.342	177.810	116.607
2.	Tanggamus	221.770	214.445	201.067	212.317	226.628
3.	L. Selatan	356.593	339.622	395.437	399.900	441.113
4.	L.Timur	340.692	449.662	443.552	492.315	509.949
5.	L. Tengah	608.294	623.779	654.545	656.886	673.564
6.	L. Utara	139.377	153.289	131.155	139.319	150.339
7.	Way Kanan	159.897	144.421	145.477	137.161	151.674
8.	Pesawaran	123.801	191.700	146.317	151.960	153.472
9.	T.Bawang	336.343	191.770	186.728	187.044	186.781
10.	B. Lampung	9.220	9.536	8.631	6.826	9.220
11.	Metro	23.130	23.443	24.988	22.555	27.027

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Pada Tabel 2. menunjukkan perkembangan produksi beras di kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2013. Pada tabel di atas produksi beras terendah terdapat di Kota Bandar Lampung yaitu pada tahun 2009 produksi beras berjumlah 9.220 ton, tahun 2010 produksi beras meningkat berjumlah 9.536 ton, kemudian pada tahun 2011 dan 2012 produksi menurun menjadi 8.631 ton dan 6.826 ton, tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 9.220 ton. Rendahnya produksi beras di Bandar Lampung disebabkan karena Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung yang menjadi pusat Pemerintahan dan perekonomian Lampung. Sehingga banyak pembangunan perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, perguruan tinggi dan lain-lain yang menggeser lahan pertanian produktif terutama lahan sawah.

Sedangkan produksi beras tertinggi terdapat pada Kabupaten Lampung Tengah, dari tahun 2009 hingga 2013 produksi beras terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2010 produksi beras berjumlah 608.294 ton, sampai pada tahun 2013 produksi beras berjumlah 673.564 ton. Produksi beras di setiap daerah tidak selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya, ada beberapa daerah yang mengalami fluktuasi produksi beras. Dari 14 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Pada tahun 2009 hingga 2013 hanya 2 kabupaten yang selalu mengalami kenaikan produksi beras setiap tahunnya yakni Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu. Selain kabupaten tersebut tingkat produksi beras selalu mengalami fluktuasi.

Sukirno (2006) mengemukakan hukum permintaan utamanya memperhatikan sifat hubungan antara harga sesuatu barang dengan jumlah barang yang diminta.

Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya banyaknya permintaan terhadap sesuatu

barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Salah satunya adalah harga barang lain.

Harga barang lain dalam penelitian ini adalah harga jagung pipilan. Jagung pipilan dikategorikan sebagai barang pengganti dari beras. Sukirno (2006) dalam bukunya mengemukakan suatu barang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Sekiranya harga barang pengganti lebih murah maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan dalam permintaan.

Tabel 3. Perkembangan Rata-Rata Harga Eceran Jagung Pipilan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 (Rupiah/Kg)

No.	Tahun	2009	2010	2011	2012	2013
1	L. Barat	2.527	2.430	2.930	4.430	4.960
2.	Tanggamus	2.358	2.761	3.308	3.297	4.069
3.	L. Selatan	2.427	2.473	3.173	3,910	4.304
4.	L.Timur	1.990	2.481	2.733	3.162	3.358
5.	L. Tengah	2.067	2.152	2.100	2.576	2.895
6.	L. Utara	1.784	2.033	2.958	3.712	4.150
7.	Way Kanan	2.200	2.179	3.944	3.817	4.227
8.	Pesawaran	2.032	2.463	2.686	3.070	3.367
9.	T.Bawang	2.154	2.310	3.350	3.820	4.390
10.	B. Lampung	2.750	3.000	3.918	4.504	5.000
11.	Metro	1.864	2.202	3.000	3.725	4.264

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

Tabel 3. menunjukkan perkembangan rata-rata harga eceran jagung pipilan di Provinsi Lampung tahun 2009-2013. Harga eceran jagung terendah terdapat pada kabupaten lampung Tengah yaitu sejumlah Rp.2.067 pada tahun 2009, kemudian meningkat sebesar 2.152 pada tahun 2010, dan selalu mengalami peningkatan harga setiap tahunnya, hingga pada tahun 2013 harga eceran jagung sebesar

Rp.2.895. Harga eceran jagung tertinggi terdapat pada Kota Bandar Lampung, yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.750. dan setiap tahunnya mengaami kenaikan harga, hingga pada tahun 2013 harga eceran jagung di Bandar Lampung sebesar Rp.5.000.

Kusumaningrum (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa permintaan beras untuk konsumsi Indonesia dipengaruhi oleh harga beras eceran, harga jagung (sebagai barang pengganti), jumlah penduduk Indonesia, pendapatan penduduk Indonesia, dan permintaan beras tahun sebelumnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang adalah jumlah penduduk. Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan. pendapatan akan menambah daya beli dalam masyarakat. Pertambahan daya beli ini akan menambah permintaan (Sukirno,2006).

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 (jiwa)

No	Kab/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	L. Barat	414.585	419.037	439.826	472.443	472.368
2.	Tanggamus	529.893	536.613	630.992	708.967	650.625
3.	L. Selatan	901.655	912.490	1.079.791	1.104.763	1.097.353
4.	L.Timur	945.367	951.639	1.109.015	1.117.023	1.114.838
5.	L. Tengah	1.160.667	1.170.717	1.444.733	1.454.969	1.411.922
6.	L. Utara	580.163	584.277	780.108	781.787	780.937
7.	Way Kanan	401.272	406.123	468.843	473.368	472.918
8.	Pesawaran	394.267	398.848	516.014	570.094	569.729
9.	T.Bawang	388.766	397.906	417.651	539.002	539.002
10.	B. Lampung	869.470	881.801	1.364.759	1.446.160	1.251.642
11.	Metro	142.988	145.471	166.452	160.962	153.517

Sumber : BPS (Badan Pusat Stasistik)

Pada Tabel 4. menunjukkan perkembangan jumlah penduduk di kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2009-2013. Pada Tabel 3. jumlah penduduk terendah terdapat pada kota Metro yaitu sejumlah 142.988 jiwa pada tahun 2009, kemudian meningkat pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 145.471 jiwa dan 166.452 jiwa. Hingga pada tahun 2012 dan 2013 menurun sebesar 160.962 jiwa dan 153.517 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk tertinggi terdapat pada Kabupaten Lampung Tengah. pada tabel tersebut menunjukkan rata-rata jumlah penduduk di setiap kabupaten Provinsi Lampung selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kaitan antara jumlah penduduk dan permintaan beras diteliti oleh Nurhayati (2005) bahwa peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen dalam jangka pendek akan meningkatkan permintaan beras sebesar 0,93 persen. Pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap permintaan beras lebih tinggi dibandingkan pengaruh peningkatan pendapatan perkapita. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk itu sendiri sekaligus akan meningkatkan konsumsi beras perkapita, sehingga secara agregat berpengaruh besar terhadap peningkatan permintaan beras.

Sebelumnya pada Tabel.1 menunjukkan tingkat produksi padi di kabupaten kota Provinsi Lampung tidak selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya atau berfluktuasi, sebaliknya pada Tabel.4 rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini dapat mempengaruhi stabilisasi harga beras di pasaran karena dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat akan mempengaruhi jumlah permintaan beras di pasaran sedangkan peningkatan jumlah permintaan tidak didukung dengan peningkatan produksi beras.

Pendapatan para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan permintaan berbagai jenis barang. Berbagai barang dapat dibedakan menjadi empat golongan: barang inferior, barang esensial, barang normal dan barang mewah. Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Biasanya barang itu terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan (beras, kopi, dan gula) dan pakaian yang utama. Perbelanjaan seperti ini tidak berubah walaupun pendapatan meningkat (Sukirno, 2006).

Tabel 5. Perkembangan Pendapatan Perkapita Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

No	Kab/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	L. Barat	6,15	6,72	8,00	8,94	9,85
2.	Tanggamus	7,88	8,94	10,21	11,85	10,21
3.	L. Selatan	9,88	11,16	12,54	14,75	16,45
4.	L. Timur	9,48	10,95	12,26	13,69	15,08
5.	L. Tengah	11,75	14,18	16,29	18,60	20,60
6.	L. Utara	11,40	13,91	17,16	21,20	24,06
7.	Way Kanan	6,32	7,40	8,46	9,68	10,81
8.	Pesawaran	10,45	12,61	14,53	16,52	18,47
9.	T. Bawang	12,23	14,22	16,03	18,74	21,84
10.	B. Lampung	19,63	22,04	25,03	28,28	32,12
11.	Metro	7,16	6,19	6,96	7,87	8,88

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Pada Tabel 5. menunjukkan perkembangan pendapatan perkapita kabupaten kota Provinsi Lampung Tahun 2009-2013. Pendapatan perkapita pada tabel diatas berdasarkan PDRB harga berlaku. Tabel 5. tersebut menunjukkan tingkat pendapatan perkapita tertinggi terdapat pada kota Bandar Lampung, yaitu pada

tahun 2009 sebesar 19,63 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2010 meningkat sebesar 22,04 juta rupiah, hingga pada tahun 2013 mencapai 32,12 juta rupiah.

Sedangkan tingkat pendapatan perkapita terendah terdapat di daerah kota Metro, dimana pada tahun 2009 pendapatan perkapita kota metro sebesar 6,19 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2010 meningkat sebesar 6,96 juta rupiah, hingga pada tahun 2013 pendapatan perkapitanya mencapai 8,88 juta rupiah. Kota Metro merupakan kota baru hasil pemekaran di Provinsi Lampung, dimana tingkat pendapatan perkapitanya masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Pada tabel di atas menunjukkan pendapatan perkapita di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Terkait antara pendapatan dan permintaan beras Nuryanti (2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita sebesar 1 persen dalam jangka pendek akan meningkatkan permintaan beras sebesar 0,01 persen. Sedangkan dalam jangka panjang pendapatan perkapita sebesar 1 persen tidak mengakibatkan perubahan permintaan.

B. Rumusan Masalah

Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bertujuan untuk melindungi petani dari rendahnya harga jual, selain itu HPP juga bertujuan untuk menstabilkan harga beras. Namun rata-rata harga beras di Provinsi Lampung dari tahun 2009-2013 selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS pada Tahun 2009 rata-rata harga beras sebesar 5.948 rupiah, kemudian 2010 harga beras sebesar 6.197 rupiah, kemudian harga beras meningkat menjadi 6.891 rupiah pada

Tahun 2011. Sedangkan pada Tahun 2012 peningkatan harga beras meningkat cukup tinggi yakni sebesar 8.240 rupiah dengan selisih harga hingga 1.349 rupiah dari tahun sebelumnya. Harga beras terus meningkat hingga pada Tahun 2013 sebesar 9.171. Data tersebut menunjukkan fakta di lapangan bahwa rata-rata harga beras selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya setelah HPP di tetapkan.

Stabilitas harga beras juga di pengaruhi oleh faktor-faktor yang mepengaruhi permintaan beras itu sendiri, seperti harga eceran beras, harga eceran jagung, jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaruh kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap permintaan beras, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan beras seperti harga eceran beras, harga eceran jagung, jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013? Apakah tujuan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjaga stabilitas harga beras telah efektif menstabilkan harga beras di Provinsi Lampung?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), harga eceran beras, harga eceran jagung, jumlah penduduk, dan pendapatan perkapita terhadap permintaan beras di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013.
2. Untuk menganalisis efektivitas kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam menjaga stabilitas harga beras di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini merupakan salah satu syarat penulis dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan stabilisasi harga beras.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kebijakan Harga Pembelian Pemerintah
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kebijakan publik mengenai perberasan nasional dituangkan dalam Inpres tahun 2005 yaitu kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan secara nasional sehingga nilai kebijakan harga yang dikeluarkan nilainya sama di setiap Provinsi diseluruh Indonesia. Dengan dikeluarkannya kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ini diharapkan dapat menstabilkan harga beras Indonesia.

Selain itu kebijakan ini diharapkan dapat membantu petani keluar dari masalah rendahnya harga jual beras pada saat panen raya dimana saat itu kuantitas yang dihasilkan meningkat sehingga menurunkan harga jual.

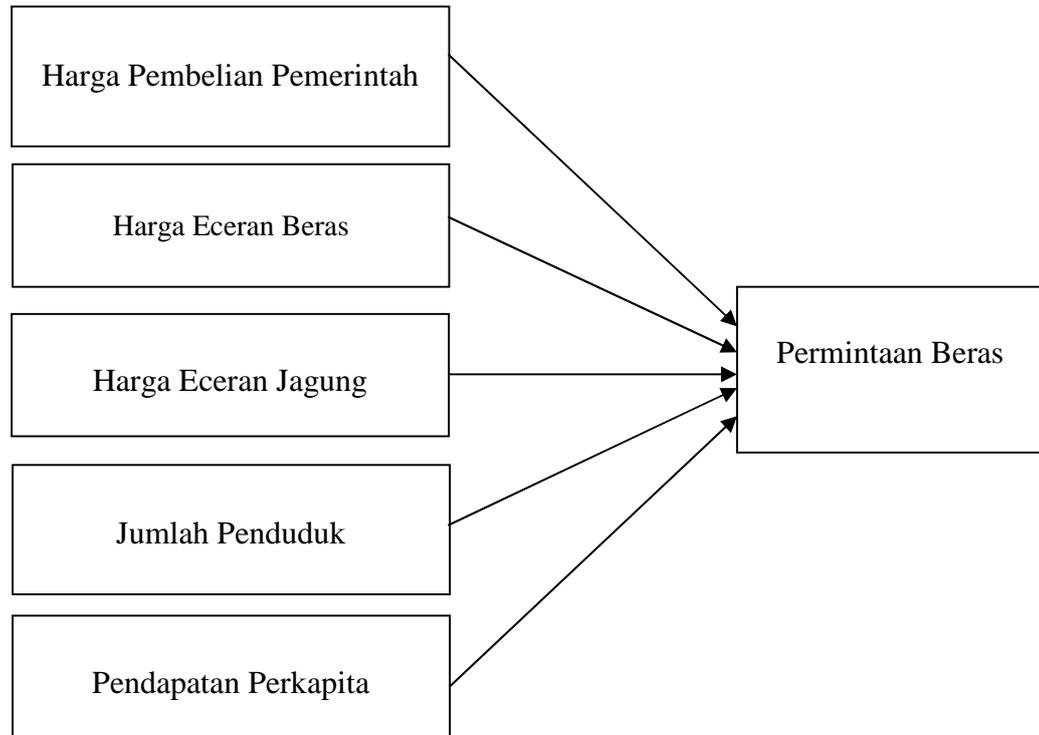
Adanya intervensi yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan harga pembelian pemerintah akan mempengaruhi tingkat harga beras. Seperti yang dikemukakan oleh Prajogo (2011) dalam penelitiannya bahwa harga dasar mempunyai pengaruh

positif dan sangat signifikan terhadap harga produsen. Harga produsen mempunyai pengaruh positif sangat nyata terhadap harga beras ditingkat konsumen. Oleh karena harga produsen sangat dipengaruhi oleh harga dasar, maka hal ini berarti bahwa harga beras di tingkat konsumen secara tidak langsung juga sangat dipengaruhi oleh harga dasar.

Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu dalam teori permintaan yang terutama di analisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Hubungan tingkat harga dengan permintaan dapat di jelaskan dengan hukum permintaan, dimana makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut (Sukirno,2006).

Selain tingkat harga, permintaan dapat dipengaruhi oleh harga barang lain, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita. Pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah beras yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga akan mengakibatkan peningkatan permintaan beras. Peningkatan pendapatan masyarakat akan menambah daya beli masyarakat sehingga menambah permintaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan beras di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung.
2. Diduga bahwa harga eceran beras (HEB) berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan beras di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung.
3. Diduga bahwa harga eceran jagung (HEJ) berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan beras di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung.

4. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan beras di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung.
5. Diduga bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap Permintaan beras di seluruh kabupaten/kota Provinsi Lampung.
6. Diduga HPP,HEB,HEJ, Jumlah penduduk, dan Pendapatan Perkapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap permintaan beras di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.
7. Diduga bahwa kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) efektif menjaga stabilitas harga beras di Provinsi Lampung.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: I Pendahuluan, II Tinjauan Pustaka, III Metode Penelitian, IV Hasil dan Pembahasan, Serta V Kesimpulan dan Saran.

- I. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan.
- II. Tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini yang diperoleh dari literatur dan sumber lainnya.
- II. Metode penelitian yang menguraikan bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari jenis dan sumber data, definisi variabel yang diteliti, alat analisis, gambaran umum tempat penelitian.
- III. Pembahasan, analisis hasil dan pengujian statistik yang telah digunakan.
- IV. Penutup adalah bab yang menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran dan keterbatasan.